

LAPORAN HASIL PENELITIAN PAYUNG

**Dinamika Politik Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi
tentang Peran Partai Politik dan Civil Society dalam Melakukan
Pendidikan dan Recruitmen Politik**



OLEH

NASIWAN	196504172000121001
Desi Ariani	NIM 08401244017
Fehri Dyah Sukmawati	NIM 09401241014

Penelitian ini dibiayai dengan dana DIPA
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
SK Dekan FIS Nomor 271a Tahun 2012 Tanggal 10 Oktober 2012.
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 2436e?UN34.14PL?2012.
Tanggal 15 Oktober 2012.

JURUSAN PKN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Karang Malang, 55281, Telp. 585168 psw.247, 248, 249, (0274)
548202, Fax (0274) 548201 Website : <http://www.fise.uny.ac.id> e-mail : fise@uny.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN PAYUNG
BIDANG POLITIK**

1. Judul Penelitian : Dinamika Politik Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta : Studi tentang Peran Partai Politik dan Civil Society dalam Melakukan Pendidikan dan Recruitmen Politik

2. Peneliti

- a. Nama lengkap : Nasiwan, M.Si
- b. NIP : 19650417 200212 1 001
- c. Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III/d
- d. Jabatan : Lektor Kepala
- e. Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
- f. Alamat : Kratinan No.54, Maguwoharjo, Depok Sleman
- g. Telepon/HP : 081578007988
- h. E-mail : Nasiwan.UNY.ac.id

3. Tema Payung Penelitian : Politik Lokal

4. Skim Penelitian : Fakultas

5. Bidang Keilmuan/ Penelitian : Politik

6. Mahasiswa yang terlibat :

No.	Nama	NIM
1	Febri Dyah Sukmawati	09401241014
2	Desi Ariani	08401244017

7. Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

8. Dana yang diusulkan : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Mengetahui
Kajur/Koord. Prodi PKnH

Dr. Samsuri, M.Ag
NIP. 19720619 200212 1 001

Yogyakarta, 27 November 2012
Peneliti,

Nasiwan, M.Si
NIP. 19650417 200212 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY



Suhrajat, M.Ag.
198903 1 001

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik pada aras lokal yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya berkaitan dengan peran Civil Society dan partai politik dalam melakukan pendidikan politik dan recruitmen politik. Penelaahan peran Civil Society dan partai politik dalam melakukan peran pendidikan politik dan recruitmen politik dilakukan dengan melakukan studi pada IRE (Institute of Ressearch Empowermewen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kulon Progo pada Pilkada Bupati dan Wakil tahun 2011.

Peneelitan ini merujuk pada penelitian kualitatif –fenomenologi yakni suatu penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena politik yang ada serta (diskurusus) apa yang berkembang di balik teks (behind the texts) dari dua peristiwa politik yang ditelaah dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara, sedangkan analisis data dibantu dengan menggunakan metode Critical Discourse Analitis (CDA).

Hasil peneltian menunjukkan bahwa; pertama, dinamika politik lokal pada aras lokal di Yogyakarta dipengaruhi oleh kemampuan –kapisistas civil society dan partai politik dalam melakukan proses pendidikan politik; Kedua, recruitmen politik yang kurang berkualitas serta kurang ligimated yang dilakukan oleh PDIP DPC Kulon Progo dipengaruhi sangat kuat, karena tidak berjalannya proses pendidikan politik untuk menghasilkan kader partai yang berkualitas; ketiga, faktor yang menghambat proses pendidikan politik dan recruitmen politik pada aras lokal yang dominan disebabkan oleh faktor internal partai politik dan civil society serta dipengaruhi oleh kondisi budaya politik di tingkat lokal yang masih cenderung belum partisipasif, masih figur sentris- elitis; keempat partai politik belum memiliki strategi yang baik (modern) dalam melakukan pendidikan politik pada aras lokal di Yogyakarta, Strategi yang dilakukan cenderung bersifat tradisional.

Kata kunci : Politik Lokal, Pendidikan Politik, Recrutimen Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEPSI	6
A. Partai Politik.....	6
B. Pendidikan Politik.....	9
C. Rekrutmen.....	10
D.kada.....	16
E. Civil Society.....	18
BAB III METODE	22
A. Tempat dan waktu Penelitian	22
B. Jenis dan Pendekatan.....	22
C. Sumber Data/Subyek Penelitian.....	23
D. Teknik pengumpulan Data.....	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknis Pengujian Keabsahan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pengantar.....	27
B. Dinamika Politik Lokal Di Kulon Progo : Fungsi Partai Politik	

dalam Proses Pendidikan Politik Dan Recruitment Politik	
B.1. Tinjauan Lokasi Penelitian.....	
B.2. Hasil Penelitian (Partai politik dan Recruitment politik di aras lokal).....	
C. Hasil Penelitian IRE.....	
a. Profil Umum Institute For Reaseach And Empoerement Yogyakarta	
b. Dokumen Teks IRE Yogyakarta.....	
c. Gambaran Umum Wilayah Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.....	
D. Analisis Teks Pertama tentang Pengautan Wacana Demilliterise Masyarakat Local.....	
Analisis Teks kedua tentang Program Pengembangan Good Governance dalam Konteks Otonomi Desa.....	
Analisis Teks Ketiga tentang Riset Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa.....	
Analisis teks keempat tentang Revitalisi Craf Women of Batik Cotegge Industri in Bantul.....	
E. Skematik.....	
F. Struktur Mikro.....	
G. Kognisi Sosial.....	
H. Konteks.....	
BAB V PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Catatan penting yang menarik untuk dicermati menyimak perjalanan "reformasi" hubungan Pusat- Daerah pada kurun waktu 1999-2012, yakni terbukanya peluang yang lebih luas untuk menggugat rentang panjang kemapanan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengaturan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jika pada era Pemerintahan Orde Baru, relasi antara Pusat dan Daerah cenderung sentralistis, maka melalui UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kebijakan pemerintah didorong untuk bergerak ke kutub desentralisasi (Syarif Hidayat,2009:1).

Semenjak bergulirnya reformasi politik tahun 1998 hingga telah saat ini (2012) kehidupan politik di aras lokal di Indonesia memunjukkan adanya suatu dinamika yang sangat berbeda dengan era sebelum adanya reformasi politik 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto serta menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Dinamika kehidupan politik pada aras lokal antara lain ditandai dengan diberikannya otonomi yang lebih luas dan real pada Daerah Kabupaten serta Provinsi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, bahkan sebagaian daerah seperti Aceh memiliki otonomi di bidang keagamaan. Secara lebih rinci bidang-bidang yang diotonomikan diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dimilikinya otoritas dalam menjalankan otonomi daerah memberikan peluang kepada kekuatan politik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai proses politik di aras lokal baik di ttingkat

B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi pusat perhatian dari penelitian ini dapat dirumuskan Bagaimana dinamika politik pada aras lokal dibaca dari sisi peran civil society dan partai politik dalam menjalankan fungsinya melakukan kegiatan pendidikan politik dan recrutmen politik? Pertanyaan utama tersebut dapat dipertajam ke dalam pertanyaan yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Apakah peran partai politik dan civil society dalam melakukan proses pendidikan politik pada aras lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta, ikut mempengaruhi dinamika politik ?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi peran partai politik dalam melakukan fungsi recrutmen politik pada aras lokal di Daerah istimewa Yogyakarta?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partai politik dan civil society untuk dapat melakukan peran pendidikan politik dan rekrutmen politik?
4. Bagaimanakah strategi partai politik dan civil society dalam melakukan proses kegiatan pendidikan politik pada aras lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ;

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran partai politik dan civil society dalam melakukan proses pendidikan politik pada aras lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi peran partai politik dalam melakukan fungsi recrutmen politik pada aras lokal di Daerah istimewa Yogyakarta?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partai politik dan civil society untuk daapt melakukan peran pendidikan politik dan rekrutmen politik.

4. Bagaimanakah strategi partai politik dan civil society dalam melakukan proses kegiatan pendidikan politik pada aras lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta:

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, secara teoritis untuk mengembangkan kajian politik khususnya tentang dinamika politik di tingkat lokal, untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang berbagai perkembangan baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Pemahaman yang benar tentang berbagai perkembangan politik setelah bergulirnya era reformasi memiliki urgensi penting dalam mendukung kegiatan perkuliahan di jurusan PKN dan Hukum, agar mampu berkontribusi untuk melahirkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi akademik.

Dari sisi praktis penelitian payung ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa PKN yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi, yang terkait penelitian di rumpun ilmu politik khususnya politik lokal. Melalui penelitian yang mengangkat topik disekitar dinamika politik lokal di DIY suatu studi tentang peran partai politik dan civil Society dalam melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik, diharapkan dapat membantu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa di Jurusan PKN dan Hukum dalam menentukan topik penelitian serta elaborasi, rumusan masalah, serta konsep-konsep /teori yang diperlukan dalam membahas topik tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEPSI

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Miriam Budiardjo.2008:397). Pendapat lain dikemukakan oleh Sigmund Neuman (1963:352), menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang memusatkan perhatiannya kepada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda (Cholisin, 2012:94-95).

Ramlan Surbakti mendefinisikan partai politik secara lebih konkrit dengan menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Dengan begitu partai politik memiliki fungsi rekrutmen yang akan mempersiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan umum.(Ramelan Surbakti, 2007: 115).

2. Sistem Kepartaian

Menurut Ramlan Surbakti (2007:116), sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik. Penggolongan sistem kepartaian berdasarkan pada jumlahnya, sistem integratif dan kompetitif dan jarak ideologi yaitu:

- a. Berdasarkan jumlah dikenal tiga sistem kepartaian, yaitu sistem tunggal, dwipartai dan multipartai

- b. Berdasarkan penggolongannya dalam sistem partai integratif dan kompetitif. Menurut Macridis (dalam Cholisin, 2005:103), sistem kepartaian kompetitif bilamana partai tersebut *sectarian*, tertutup dan *diffused*.. Sistem kepartaian kompetitif bilamana partai politik tersebut komprehensif, terbuka dan fungsinya terspesialis.
- c. Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi menurut Giovanni Sartoni (dalam Ramlan Surbakti, 1992:127-128) menyatakan bahwa penggolongan sistem kepartaian bukan masalah berdasarkan jumlah, tetapi lebih kepada jarak ideologi diantara partai-partai yang ada, dengan didasarkan atas jumlah kutub, jarak antara kutub-kutub tersebut dan arah perilaku politiknya.

Secara teoritik, menurut Almond (1999:145) variasi sistem kepartaian dibagi dalam kepartaian kompetitif dan kepartaian nonkompetitif. Yang pertama, sistem kepartaian kompetitif membagi sistem kepartaian menurut jumlah dan kutubnya. Menurut jumlahnya sistem kepartaian terdiri dari dwipartai politik dan multipartai politik. Sistem dwipartai melahirkan dua partai yang harus berkompetisi dalam pemilu. Lain halnya dengan multipartai yang memberikan peluang bagi banyak partai untuk berkompetisi dalam Pemilu. Sistem yang kedua menurut variasi sistem kepartaian menurut Almond yaitu nonkompetitif dengan membagi sistem kepartaian pengkutuban kepentingan, yaitu konsensual, konfliktual, dan konsosional.

3. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. (Ramlan Surbakti, 2007:116). Cara memperoleh kekuasaan tersebut dilaksanakan melalui jalur Pemilu, sedangkan partai tunggal dalam sistem totaliter memperoleh kekuasaan dengan paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial

kelompok. Fungsi lain yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2007:116-121) yaitu:

a) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat

b) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

c) Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut menentukan pemimpin. Dalam hal ini partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota atau masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

d) Pemadu Kepentingan

Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan.

e) Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

f) Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari berbagai pihak yang selanjutnya membawa

permasalahan tersebut ke musyawarah badan perwakilan rakyat untuk memperoleh penyelesaian berupa keputusan politik.

g) **Kontrol Politik**

Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Haryanto (1984:11) mengemukakan bahwa partai politik dalam melaksanakan kegiatannya bergantung pada kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikerjakan. Fungsi partai politik mencakup: sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, artikulasi dan agresi kepentingan, partisipasi politik, pengatur konflik, pembuat kebijakan, serta mengkritisi rezim yang berkuasa.

Menurut Miriam Budiardjo (1982:14-19) fungsi partai politik yang paling penting meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan.

B. Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal hendak akan dibangun (Alfian dalam Cholisin, 2011:1).

Pendidikan politik dalam konteks kegiatan pemilu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Alfian, 1990:245). Pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong agar warga negara memiliki pengetahuan politik yang memadai, serta kesadaran akan

suatu pentingnya system politik yang ideal. Pendidikan politik mempunyai fungsi sosialisasi politik serta untuk melakukan pembaharuan politik, suatu perubahan politik yang *predictable*, dan terencana.

C. Rekrutmen

Kegiatan rekrutmen calon anggota eksekutif daerah merupakan suatu salah satu bentuk rekrutmen politik dan aplikasi dari fungsi partai politik dan seapak terjangnya tidak terlepas dari ilmu politik. Miriam Budiardjo (2008:408) mengemukakan fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun nasional.

Senada dengan yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo, rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai seleksi dan pemilihan, atau seleksi dan pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Ramlan Surbakti, 2007:118). Disamping itu, rekrutmen menurut Haryanto (1984: 19) yaitu “suatu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon calon pemimpin. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang menonjol”.

Pengertian lain mengenai rekrutmen yaitu sebagai proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya jabatan birokrasi atau administrasi negara/pemerintahan dan partai-partai politik (Suharno. 2004: 116). Oleh karena itu rekrutmen politik khususnya diarahkan pada pemilihan kader-kader politik dan warga negara pada umumnya untuk dijadikan kader partai yang nantinya akan mewakili partai, kontituen ataupun masyarakat dalam lembaga eksekutif ataupun legislatif. Tentunya dalam rekrutmen

politik harus melalui berbagai tatacara yang ditempuh sejalan dengan undang-undang dan kesepakatan internal partai yang bersangkutan.

Secara umum sistem rekrutmen politik yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam system politik menurut Nazaruddin Syamsuddin (1993:124) dapat berlangsung dalam dua bentuk yaitu terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam penyeleksian. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik ataupun pemerintahan. Dalam hal ini orang-orang direkrut dan memperoleh posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional, misalnya nepotisme (pertemanan ataupun pertalian keluarga), sogokan dan lain-lain.

Partai politik sebagai wadah kekuatan politik yang mempunyai salah satu fungsi adalah menyelenggarakan rekrutmen politik termasuk perekrutan caleg-caleg untuk berkontestasi dalam pilkada. Dengan kata lain, partai politik merupakan pintu gerbang masuknya kandidat-kandidat eksekutif yang siap bertarung dalam pilkada.

Partai politik dalam hal merekrut kader untuk didudukkan sebagai calon eksekutif, tentu terkandung harapan terhadap calon tersebut untuk dapat terpilih oleh masyarakat (konstituen) dan kelak dapat menjadi wakil rakyat yang berbobot. Oleh karenanya dalam melaksanakan rekrutmen calon, partai politik harus memiliki pertimbangan yang sifatnya komprehensif. Terkait dengan hal itu, menurut Czudnowski dalam Fadillah Putra, ada tujuh faktor yang dapat menentukan terpilihnya atau tidaknya seseorang dalam lembaga, sekaligus merupakan penentu dari penampilan (performance) seseorang elit politik. Secara ringkas ketujuh faktor tersebut adalah: 1) *Social Background*; 2) *Political Socialization*; 3) *Initial Political*

Activity; 4) *Apprenticeship*; 5) *Occupational Variables*; 6) *Motivations*; dan 7) *Selection* (Putra, 2003:207-210).

Rekrutmen calon anggota eksekutif setidaknya memuat tiga hal pokok, yaitu: "(1) *who is eligible?*; (2) *who nominates?*; dan (3) *who is nominated?*" (Djojosoekarto dan Sandjaja, (eds), 2008:180).

Siapakah yang memenuhi syarat untuk direkrut (*who is eligible*)? Norris dalam Katz and Crotty, 2006 dalam Djojosoekarto dan Sandjaja, (eds), 2008:180-181) memberikan ilustrasi bahwa siapa yang dapat diproses adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang bersifat umum maupun khusus, secara hukum (*legal restrictions*). Syarat-syarat umum biasanya menyangkut soal ketentuan umur (*age*), kewarganegaraan (*citizenship*), tempat tinggal atau domisili (*residence*). Hal lain yang lebih khusus misalnya pendidikan (*educational*) atau kualifikasi literasi (*literacy qualification*), bahkan ada yang memasukkan persyaratan deposito dana (*monetary deposits*), larangan bagi calon tertentu (*incompatibilities*) dan bukti tandatangan dukungan (*the need to gather supporting signatures*). Persyaratan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilu (*electoral laws*) Nomor 10 Tahun 2008 dan sebagian diatur secara internal di masing-masing partai politik.

Selain batasan berdasarkan ketentuan hukum (*legal restrictions*) di atas, persyaratan sertifikasi juga ditentukan oleh partai politik melalui aturan internal (*internal rules*), konstitusi (*constitutions*) dan aturan perundangan (*by laws*). Pada umumnya, masa keanggotaan partai dipersyaratkan pula dalam proses pencalonan (*candidacy*) untuk meyakinkan adanya loyalitas (*loyalty*) terhadap partai dan familiaritas (*familiarity*) terhadap berbagai kebijakan partai. Selanjutnya menurut Norris (2006) dalam Djojosoekarto dan Sandjaja, (eds), 2008:181-182) membagi proses rekrutmen ke dalam tiga tahap:

(1) sertifikasi (*setification stage*); (2) nominasi (*nomination stage*); dan (3) pemilihan (*election stage*).

Tahap sertifikasi (*setification stage*) melingkupi (1) *legal requirements for eligibility*; (2) *electoral system and law*; dan (3) *informal social norms and cultural values*. Dalam hal ini partai politik harus mempertimbangkan pada peraturan perundangan serta norma dan nilai sosial-budaya yang diantaranya diindikasikan pada bukti dukungan, transparansi dan akuntabilitas pendanaan, pendidikan dan domisili. Dalam prakteknya tahap sertifikasi ini dapat dilakukan pada tahap penjarangan bakal calon anggota legislatif yang sepenuhnya berpijak pada legalitas formal yang berlaku secara umum.

Tahap nominasi (*nomination stage*) setidaknya meliputi lima komponen, yaitu: (1) prosedur internal partai (*candidate nomination perocedures within each party*); (2) ketersediaan calon yang memenuhi syarat (*supply of eligible candidates*); (3) kebutuhan tim seleksi partai (*demand by party selectors*); (4) terseleksinya calon yang dinominasikan (*pool of nominated candidates*); dan (5) calon independen yang tidak dinominasikan oleh partai manapun (*independent candidates without any party nomination*). Komponen yang terakhir ini belum dapat diterima sepenuhnya oleh partai politik di negeri ini untuk pencalonan anggota legislatif pusat dan di daerah. Untuk sementara ini tampaknya hanya berlaku pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tahap pemilihan (*election stage*) sekurang-kurangnya perlu mempertimbang-kan: (1) kebutuhan elektorat (*demand by electorate*); (2) kebutuhan akan akses dan penggunaan media massa, dukungan dana dan berbagai pendukung lain (*demand by news media, financial supporters, and other backkers*). Tahap ketiga ini, bersama dengan dua tahap sebelumnya dapat dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen calon anggota legislatif. Tahap kedua dan ketiga dapat juga disebut sebagai tahapan

penyaringan caleg yang menuju pada penetapan calon anggota legislatif sementara. Sebab pada tahap ini berlangsung penilaian secara komprehensif atau dengan kata lain dilakukan seleksi secara seksama tentang kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki para bakal caleg.

Terakomodasi atau tidaknya keterwakilan perempuan dalam suksesi pencalonan anggota legislatif, sedikit-banyak tergantung pula pada siapakah yang menominasikan (*who nominates*)? Menurut Norris (2006) dalam Djojosekarto dan Sandjaja, (eds), 2008:182-183), menjelaskan bahwa siapa yang menominasikan calon dapat ditentukan oleh tiga hal: *Pertama*, tingkat sentralisasi (*degree of centralisation*). Hal ini bertautan dengan seberapa besar peran pimpinan pusat partai menentukan nasib seseorang dalam proses pencalonan: apakah itu ditentukan oleh pimpinan pusat atukah sebagian didistribusikan kepada pimpinan regional dan/atau lokal. Umumnya pencalonan dilakukan dari "bawah", melalui pengurus lokal dan regional dengan mempertimbangkan suara "akar rumput" atau anggota partai, kemudian sejumlah calon yang direkrut dipilih dan ditentukan oleh pimpinan pusat. *Kedua*, ruang partisipasi (*the breadth of participation*). Hal ini sehubungan dengan berapa banyak orang yang terlibat dalam menentukan proses seleksi: sejumlah kecil anggota tim seleksi atau banyak orang juga diberi peluang untuk memberikan penilaian yang menentukan dalam pencalonan. *Ketiga*, lingkup pengambilan keputusan (*scope of decision-making*). Locus pengambilan keputusan secara umum dapat diklasifikasikan berada pada tiga ranah: (1) regulasi hukum (*legal regulatioan*); (2) konstitusi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai; dan (3) aturan formal partai tentang proses seleksi.

Hal pokok yang ketiga dalam kegiatan rekrutmen calon anggota legislatif adalah terkait dengan "siapakah yang dinominasikan (*who is nominated*)? Tentu saja yang dinominasikan itu adalah mereka yang memenuhi persyaratan ideal baik perundangan, konstitusi partai

(AD/ART) maupun aturan-aturan khusus yang diatur dalam keputusan partai politik yang dapat diimplementasikan melalui pembuatan kriteria atau persyaratan tertentu yang mengarah kepada keselarasan bidang tugas di legislatif. Hal ini terkandung harapan kelak terpilih nanti akan turut meningkatkan kinerja di lembaga legislatif. Demikian yang dipaparkan oleh Djojosekarto dan Sandjaja, (eds), 2008:183) bahwa calon yang dinominasikan perlu disesuaikan pada harapan peningkatan kinerja pada lembaga mana yang akan ditempati kandidat tersebut. Karena lebih sempit ruang lingkungannya, maka ketentuan lain yang banyak diatur oleh aturan perundangan negara atau sistem politik nasional, dapat saja tidak menjadi pertimbangan pokok. AD/ART atau konstitusi partai serta aturan main lain yang diderivasikan daripadanya melalui keputusan partai, selain kriteria berdasarkan kebutuhan partai atau kondisi sosial-kultural di mana partai berada menjadi hal-hal pokok yang mendasari proses rekrutmen.

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut, persyaratan dan prosedur rekrutmen politik yang diselenggarakan oleh suatu partai politik, serta terkait pula dengan topik kajian ini, maka lebih lanjut Geddes (1994) dalam (Peliman Dibau. 2010: 24-25) mengemukakan preferensi rekrutmen politik yang baik bagi partai politik, yaitu:

- 1) *Partisanship*: Rekrutmen didasarkan dan diarahkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas kepada partai. Oleh karena itu, perbedaan identitas (program maupun kebijakan) dari partai ini terhadap partai lainnya menjadi sangat penting bagi para pendukungnya.
- 2) *Survival*: Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki sumber finansial dan massa. Ini biasa dilakukan oleh partai-partai pada saat menghadapi momen pemilu.
- 3) *Meritokratik*: Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Di sini kompetensi akan menjadi ukuran penting.

- 4) *Kompartementalisme*: Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan penguatan departemen-departemen yang dianggap strategis dalam organisasi. Sisi-sisi kompetensi juga mendapat perhatian penting dalam seleksi.

Secara umum empat pola dasar yang dijabarkan di atas tampaknya telah menjadi kecenderungan bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota, pengurus maupun pejabat politik, termasuk berkenaan dengan rekrutmen calon anggota eksekutif daerah. Sebab secara konseptual segala bentuk rekrutmen dalam berbagai tujuan yang dilakukan oleh partai politik dapat dikategorikan ke dalam empat prinsip rekrutmen politik yang diungkapkan oleh Geddes. Selanjutnya ilustrasi yang diketengahkan Norris dan ulasan yang diketengahkan oleh Geddes dapat digunakan dalam menganalisis rekrutmen calon Bupati oleh PDIP pada Pilkada 2011.

D. Pilkada

Ketika transisi menuju demokrasi dimulai, menyusul bangkrutnya Orde Baru, semangat desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Undang-undang lama dihapuskan dan kemudian digantikan oleh UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004, yang lebih "konkret" dan sedikit-banyak mempunyai semangat desentralisasi dan demokrasi lokal.

Semangat yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakekatnya untuk mengoptimalkan demokratisasi di daerah, disamping sebagai perwujudan otonomi daerah seluas-luasnya. Tujuan Pilkada langsung adalah agar rakyat di daerah dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Oleh karena itu, Pilkada secara langsung adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan

cara-cara yang damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya partisipasi masyarakat dan pengakuan perbedaan, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut harus diselesaikan secara damai.

Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah, atau proses pembentukan pemerintahan di daerah dalam kerangka demokratis. Diwujudkan dengan bentuk aktif warga negara dalam ikut membentuk pemerintahan di daerah (Hazwan Iskandar Jaya.2010:1). Pilkada langsung merupakan arena masyarakat politik, tempat bagi masyarakat untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara. Sehingga, bagaimanapun pilkada secara langsung merupakan proses pemilihan dengan model yang lebih demokratis dibanding dengan model feodal, model birokrasi, maupun model oligarkhis.

Menurut Sutoro Eko (2004: 9), bahwa ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokrasi secara langsung. *Pertama*, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, karena melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas. Partisipasi akan membuka voice, akses, dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. *Kedua*, proses partisipatif memungkinkan adanya kontrak sosial antara kandidat, partai politik, dan konstituen. Kontrak sosial adalah sebuah proses yang mempertemukan antara visi misi kandidat dan mandat dari konstituen melalui mediasi partai politik. *Ketiga*, pilkada langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi konstituen untuk menentukan calon pemimpin yang lebih baik dan *legitimate*.

Harapan-harapan ideal tersebut dapat terwujud bila ditopang beberapa hal. *Pertama*, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. *Kedua*, adanya budaya politik demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan

partisipatif. *Ketiga*, masa pemilih yang terdidik, *well-informed* dan rasional-kritis. *Keempat*, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen (Sutoro Eko, 2004:10).

E. Civil Society

Disukusi tentang terminologi civil society terbagi dalam dua perpektif, pertama pihak yang memandang bahwa civil society memiliki terkaitan dengan erat dengan Negara. Civil Society merupakan termasuk bagian dari konsep sebuah masyarakat politik yang dicipta-citakan. (Neera Chandoke, 2001:115).

Sementara itu pandangan kedua, menyatakan bahwa civil society merupakan sebuah ranah masyarakat yang terpisah dari negara. Civil Society adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian yang memiliki sikap tegas terhadap berbagai kepentingan kekuasaan. Dalam konsep civil society memiliki makna adanya partisipasi aktif semua warga baik yang tergabung dalam berbagai perkumpulan organisasi atau kelompok lainnya sehingga akan membentuk karakter di lembaga tersebut. (Cohen, Jean L dan Andrew Arato, 2003).

Kehadiran Civil Society dalam negara yang sedang mengalami transisi demokrasi, menurut Linz dan Stepan, adalah merupakan bagian yang penting untuk menciptakan konsolidasi demokrasi. Tugas civil society adalah menghasilkan gagasan-gagasan yang konstruktif dalam pembangunan dan juga memonitor aparat-aparat negara serta kemlompok-kelompok ekonomi. (Linz dan Stepan, 1996: 7-8).

Civil society dengan partai politik dalam banyak aspek memiliki relasi. Misalnya ada beberapa aktiitas yang dilakukan oleh civil society dan partai politik secara bersama-sama, dimana lebih banyakn fokus dalam konteks pembuatan k kebijakan publik seperti advokasi atau lobi terhadap suatu isu yang sedang dibahas dalam proses pembuatan suatu undang-

undang. Dalam konteks ini civil society sebagai kelompok kepentingan akan melobi partai politik di DPR untuk mendorong dan mendiskusikan kepentingan yang mereka ajukan. Sebagai organisasi yang independen Civil society, memiliki peran untuk memonitor janji-janji kampanye para kandidat dan partai dalam masa kampanye serta perilaku para politisi di DPR. Civil society juga bisa sebagai wadah untuk mendiskusikan berbagai hal-hal penting terkait isu-isu yang mereka butuhkan (Aditya Perdana, 2009:5).

Dalam konteks kebutuhan partai politik, civil society juga berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya, melalui berbagai bentuk pelatihan pengembangan kapasitas. Civil society juga berperan untuk menyediakan para aktor dan pimpinannya sebagai kandidat yang mumpuni dalam ajang pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Pada saat yang sama civil society juga dapat berperan dalam memobilisasi para pemilih untuk dapat memilih pemimpin partai politik yang sesuai dengan arah dan kepentingan mereka sebagai pemilih.(Aditya Perdana, 2009: 6).

Sementara itu jika dilihat dari aspek institusi, menurut Beavis antara civil society dan partai politik, dari perspektif civil society paling tidak ada tiga variasi kemungkinan; (1) menghindari kontak dengan partai politik, dimana civil society berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik sehingga mereka tidak diklaim memiliki aktivitas yang partisan. (2) mendukung partai politik secara menyeluruh, tanpa ada keberpihakan, hal ini dilihat dari komitmen civil society untuk mendukung partai politik berdasarkan agenda dan isu yang sama dengan kepentingan civil society tersebut. (3) beraliansi dengan satu partai politik, dalam konteks ini sebuah kelompok civil society atau lebih menyediakan berbagai informasi dan bentuk pelatihan hanya kepada satu partai politik (Gwendolyn Beavis, 2004: 7).

Sedangkan dari perspektif partai politik ada empat kemungkinan relasi dengan civil society: (1) memiliki jarak yang jauh dengan civil

society. Situasi ini mengindikasikan bahwa antara partai politik dan civil society tidak memiliki hubungan atau terjadi kompetisi yang keras satu sama lain, sehingga tidak memiliki relasi yang dekat. (2) partai politik mendapatkan dukungan dari banyak kelompok masyarakat dalam waktu yang singkat, hal ini tergantung dari kepentingan seperti apa yang menjadi titik temu dari relasi tersebut. (3) partai politik memiliki hubungan jangka panjang dengan satu atau beberapa kelompok civil society, hal ini diindikasikan dari adanya dukungan serius dan permanen dari satu kelompok civil society kepada satu partai politik seperti kelompok think tank, kelompok serikat pekerja. (4) Relasi yang terputus antara partai politik dengan civil society, hal ini dimungkinkan jika salah satu organ partai memutuskan keluar dari partai dan bertransformasi menjadi kelompok civil society dengan pertimbangan efektivitas kerja dibandingkan berada dalam partai politik. Sedangkan dari sisi pengaruhnya relasi antara partai politik dan civil society tergantung dari konteks bagaimana kepentingan tersebut berhasil diolah dan dikelola. Dalam hal ini ada partai politik yang memiliki kelompok-kelompok civil society yang punya pengaruh di dalam konstituen sehingga partai memiliki kekuasaan yang besar. Sebaliknya kelompok civil society juga memiliki tingkat independensi yang tinggi dibanding partai politik, karena dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial politik di negara yang bersangkutan. (Aditya Perdana, 2009:6).

Civil society (LSM) dilihat dari paradigmanya yakni dari sisi bagaimana mereka mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasinya bagi program aksinya , dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipologi. Tiga tipologi tersebut yaitu (1) LSM yang menganut paradigma konformisme (2) LSM yang menganut paradigma reformasi (3) LSM yang menganut paradigma transformasi.

Tipe LSM yang merujuk pada paradigma konformisme, terdiri atas aktivis LSM yang melakukan pekerjaan mereka berdasarkan kepada paradigma bantuan karitatif atau sering disebut bekerja tanpa teori.

Kategori kedua, adalah LSM yang mendasarkan pada pemikiran pada ideologi Modernisme dan Developmentalisme. Mereka percaya perlunya meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan korupsi di pemerintahan dianggap sebagai sebab utama keterbelakangan. Tesis dibalik tema ini adalah bahwa keterbelakangan mayoritas rakyat Indonesia disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas dan nilai-nilai rakyat. Mentalitas dan nilai-nilai yang terbelakang ini dianggap menjadi penyebab utama kelemahan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Sedangkan kategori ketiga adalah tipe LSM transformatif. Salah satu ciri terpentingnya LSM transformatif, adalah mempertanyakan paradigma mainstream yang ada dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya; dan berusaha menemukan paraddddidgma alternatif yang akan mengubah struktur dan super struktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiannya. Mereka mendorong ke arah terciptanya struktur dan superstruktur yang memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol cara produksi informasi dan ideologi mereka sendiri. Mereka mencari struktur dan superstruktur yang memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan sejarah mereka sendiri, struktur yang memungkinkan bagi masyarakat menuju jalan demokrasi dalam perubahan sosial, ekonomi dan politik. Dalam pandangan mereka kegiatan pendidikan (popular education) diposisikan untuk menghadirkan kesadaran kritis masyarakat (Mansour Fakhri, 1996:122-131)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yakni di kabupaten Kulonprogo dan di kabupaten Bantul serta kantor IRE. Penelitian mengenai bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik; studi kasus rekrutmen calon Bupati oleh PDIP dalam Pilkada Kulon Progo 2011 ini dilaksanakan di kantor DPC PDIP Kulon Progo. Alasan dipilihnya DPC PDIP Kulon Progo karena partai tersebut merupakan partai yang perolehan suaranya besar dalam pemilu 2009.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2012.

B. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengungkap gambaran objektif mengenai keadaan yang terdapat pada diri objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dilakukan untuk mendeskripsikan secara kualitatif sasaran melalui kajian intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Moleong, 2001: 3). Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa

adanya tanpa ada rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural (Indyah, 2007:1)

Berdasarkan jenis dan metode penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran partai politik dalam pendidikan politik: studi kasus rekrutmen calon bupati oleh PDIP pada pilkada kulon progo 2011 .

C. Sumber Data/Subjek Penelitian

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh. Suharsini Arikunto (2002;107) mengklarifikasikan sumber data menjadi tiga jenis ; *person*, *place*, dan *paper*. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan ialah jenis *perso*, *paper* dan *place*.

Penentu subjek penelitian berupa *person* dilakukan dengan teknik purposif. Dengan teknik ini, ditetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek berupa *paper* digunakan sebagai sumber data-data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa *place* dibutuhkan untuk memperkaya data penelitian melalui observasi. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari PDIP DPC Kulon Progo dan IRE.

D. Teknik pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara

Pedoman wawancara merupakan instrumen dalam wawancara terstruktur yang berisi daftar pertanyaan yang terinci secara tertulis dalam lembar pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari nara sumber (sekretaris dan bagian HUMAS DPC PDIP Kulon Progo) tentang

perekrutan anggota dan kader parpol. Dari Pengurus IRE, informan dari masyarakat desa Wukirsari, Bantul.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung untuk mengumpulkan data mengenai pendidikan politik melalui rekrutmen partai politik PDIP dan di Desa Wukir Sari Bantul, Yogyakarta, lokasi dilaksanakannya pembedayaan dan pendidikan politik masyarakat oleh IRE.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh institusi yang terkait dengan tema penelitian ini atau foto-foto serta surat-surat keputusan yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Suharsini Arikunto (1991:121) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu pada penelitian menggunakan metode pengumpulan data. Instrumen tersebut berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman wawancara tersebut berkaitan dengan "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik: Studi Kasus Rekrutmen Calon Bupati oleh PDIP pada Pilkada Kulon Progo 2011" dan pendidikan politik yang dilakukan oleh IRE. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen penelitian.

F. Teknis Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan secara *cross check data*.

G. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data, dipilih hal-hal yang pokok dan penting dari tema dan polanya serta reduksi data selanjutnya dilakukan dengan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap ada di dalamnya. Langkah ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi lebih mudah dikendalikan. Reduksi merupakan bagian dari analisis. Fungsinya buntut menajamkan, menggolongkan, mengarah membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid. Keika menyangsikan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informasi lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui (Basrowi dan Suwandi,2008:209)

Data yang diperoleh merupakan data yang masih kasar dan kompleks, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian data yang relevan yang dapat digunakan dengan memilih data pokok yang mengarah pada permasalahan peneliti tentang Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik: Studi Kasus Rekrutmen Calon Bupati oleh PDIP pada Pilkada Kulon Progo 2011 dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Civil society (IRE) di desa Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

2. Deskripsi dan Kategori Data

Deskripsi data dalam penelitian ini yakni mengetahui bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik khususnya melalui rekrutmen politik calon Bupati oleh PDIP

pada Pilkada Kulon Progo 2011 dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh civil society (IRE) di Kabupaten Bantul, desa Wukirsari

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut dikategorikan sesuai sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Sehingga data dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik: Studi Kasus Rekrutmen Calon Bupati oleh PDIP pada Pilkada Kulon Progo 2011 dan Proses kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh civil society (IRE) di desa Wukirsari, Bantul, Yogyakarta.

3. Display Data

Display data merupakan penyajian data ke dalam matriks yang sesuai. Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis.

4. Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan disusun selanjutnya dibuat kesimpulan. Pengambilan kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian diperiksa keabsahannya. Ketiga langkah tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis data-data penelitian sehingga dapat tercapai suatu uraian yang sistematis, akurat dan jelas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban permasalahan, yaitu Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik: Studi Kasus Rekrutmen Calon Bupati oleh PDIP pada Pilkada Kulon Progo 2011. Serta kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh IRE di Wukirsari, bantul, Yogyakarta.